

**PERATURAN DESA GAMPENG
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG**

*Forst
2/10*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-
	15
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.....	III-
	10
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025.....	III-1
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025.....	III-
	13
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025.....	III-
	16
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025.....	III-
	17
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V
	ii



**PERATURAN DESA GAMPENG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAMPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

21. Peraturan Desa Gampeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gampeng Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Gampeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gampeng Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Gampeng Tahun 2025 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG
dan
KEPALA DESA GAMPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gampeng.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gampeng dibantu Perangkat Desa Gampeng sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gampeng.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Gampeng
Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Gampeng
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Gampeng untuk jangka waktu 8 (enam) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gampeng

Ditetapkan di Gampeng
pada tanggal 24 September 2025

KEPALA DESA GAMPENG,



TELIANA SING FAEDAHTI

Diundangkan di Gampeng
pada tanggal 25 September 2025

KEPALA DESA GAMPENG,



TELIANA SING FAEDAHTI

LEMBARAN DESA GAMPENG TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN

PERATURAN DESA GAMPENG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan

Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Gampeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Gampeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gampeng Tahun 2019-2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Gampeng ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Gampeng serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp 1.998.180.450 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan	1.825.225.631,87	1.998.180.450	
4.	Pendapatan	1.825.225.631,87	1.998.180.450	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.726.916	134.800.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	8.926.916	6.000.000	
4.1.2.	Hasil Aset	2.500.000	2.500.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	126.300.000	126.300.000	
4.2.	Transfer	1.673.106.200	1.858.280.450	
4.2.1.	Dana Desa	1.084.883.000	1.184.883.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	88.042.000	88.042.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	500.181.200	585.355.450	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.392.515,87	5.100.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0,00	0,00	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	9.193.400	0,00	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0,00	0,00	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang	0,00	0,00	

	mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan		
4.3.6.	Bunga Bank	5.199.115,87	5.199.115,87
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Proyeksi Belanja Desa Gampang sebesar Rp.1.998.180.450,- (Satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja	1.863.956.141.44	1.998.180.450	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	828.113.088,32	878.113.088	
5.1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa			
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	36.696.000	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	248.974.264	248.973.264	

	Perangkat Desa			
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.316.296	30.316.296	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	79.514019,48	79.514.140	
	Penyediaan Tunjangan BPD	33.991.200	33.991.200	
	Penyediaan Operasional BPD	2.351.200	3.351.200	
	Penyediaan Insentif RT/RW	54.608.000	55.800.000	
	Penyediaan operasional Pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	32.500.000	32.500.000	
	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	108.000.000	108.000.000	
5.2.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa			
	Penyediaan sarana (aset tetap)	0,00	15.000.000	
	perkantoran/pemerintahan			
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	76.929.845,27	60.000.000	
	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.200.000	6.200.000	
5.1.3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa			
	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	0,00	3.227.000	
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	16.227.500	16.227.500	
	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	600.000	600.000	
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.403.300	5.403.300	
	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	0,00	0,00	
5.1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
	Penyelenggaraan	26.851.500	26.851.500	

	Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.680.000	4.680.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	0,00	1.500.000
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	0,00	1.000.000
	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.475.000	1.425.000
	Penyusunan Kebijakan Desa	0,00	2.000.000
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0,00	1.000.000
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.434.671,57	12.434.600
	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	0,00	-
	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	4.717.500	10.000.000
	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	0,00	-
	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	0,00	20.000.000
	Forum Pembina Desa	7.900.000	7.900.000
5.1.5	Sub Bidang Pertanian		
	Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	0,00
	Administrasi Pertanian	0,00	5.000.000
	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	0,00	0,00
	Mediasi Konflik Pertanian	0,00	0,00
	Penyuluhan Pertanian	0,00	0,00
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	41.616.500	41.616.500
	Penetapan Batas/ Patok Tanah Desa	0,00	0,00
	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00

5.2	Bidang Pembangunan Desa	699.145.000	978.789.600	
5.2.1	Sub Bidang Pendidikan			
	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	127.692.000	127.692.000	
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	0,00	0,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	0,00	0,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	0,00	0,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Non- Formal Milik Desa	0,00	0,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	0,00	89.562.400	
	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	0,00	0,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	0,00	1.200.000	
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0,00	-	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0,00	-	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	0,00	1.000.000	
5.2.2	Sub Bidang Kesehatan			
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan (PKD)/Polindes Milik Desa	0,00	-	
	Penyelenggaraan Posyandu	173.317.500	173.317.500	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	0,00	-	

	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.099.000	51.099.000
	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	0,00	0,00
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.830.000	3.830.000
	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	0,00	0,00
	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0,00	0,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0,00	4.500.000
	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	0,00	5.000.000
5.2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	0,00
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0,00	0,00
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	0,00
	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	0,00	0,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0,00	0,00
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	0,00
	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0,00	0,00
	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0,00	0,00
	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	0,00	0,00
	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	214.049.500	0,00
	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	0,00	184.150.150
	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	0,00	0,00
	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	0,00	78.050.000

	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	0,00
	Pembangunan/Rehabilitasi Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	0,00	0,00
	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	0,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0,00	0,00
	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	0,00	0,00
	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	0,00	0,00
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.053.600	20.000.000
5.2.4	Kawasan Permukiman		
	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	0,00	0,00
	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	0,00	0,00
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	0,00	50.000.000
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0,00	0,00
	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	0,00	0,00
	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0,00	0,00
	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0,00	5.000.000
	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	0,00	0,00
	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	0,00	0,00
	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	0,00	0,00
	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	0,00	0,00
	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0,00	0,00

	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman		0,00	
	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0,00	0,00	
	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0,00	5.000.000	
	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	0,00	0,00	
	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	0,00	0,00	
	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		0,00	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	0,00	0,00	
5.2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	
	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0,00	0,00	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	0,00	0,00	
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	
5.2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			
	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	0,00	2.000.000	
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	0,00	0,00	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	0,00	8.580.000	
5.2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0,00	0,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0,00	0,00
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00
5.2.8	Sub Bidang Pariwisata		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0,00	0,00
	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	0,00	0,00
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0,00	0,00
	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	121.250.875	134.525.100
5.3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	0,00
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	0,00	5.000.000
	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	0,00	0,00
	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	0,00
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	0,00	0,00
	Bantuan Hukum Untuk	0,00	0,00

	Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin			
	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	18.422.059,12	3.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	16.929.559,12	16.929.600	
5.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00	0,00	
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	0,00	12.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	0,00	0,00	
	Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa	0,00	0,00	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	51.562.816	21.600.000	
5.3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	

	tingkat Desa			
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0,00	9.594.000	
	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0,00	0,00	
	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	8.532.000	0,00	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	
5.3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
	Pembinaan Lembaga Adat	2.400.000	2.400.000	
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.932.500	7.825.000	
	Pembinaan PKK	15.277.000	32.840.500	
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	11.045.000	
	Pembinaan Karang Taruna	0,00	8.730.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	3.561.000	3.561.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	163.783.900	117.666.800	
5.4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	
	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0,00	0,00	
	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0,00	0,00	
	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0,00	0,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0,00	0,00	
	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0,00	0,00	

	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	0,00	0,00
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan	0,00	0,00
5.4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,00	0,00
	Peningkatan Produksi Peternakan	0,00	0,00
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	48.406.500	10.000.000
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0,00	0,00
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	2.005.000	0,00
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	0,00	0,00
5.4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
	Peningkatan kapasitas kepala Desa	0,00	3.000.000
	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	0,00	16.500.000
	Peningkatan kapasitas BPD	0,00	7.000.000
5.4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00
	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	0,00	0,00
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	0,00	0,00
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.000.000
5.4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		

	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0,00	0,00
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	0,00	0,00
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	0,00	0,00
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00
5.4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
	Pembentukan BUM Desa	0,00	0,00
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	0,00	1.800.000
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	50.566.400	50.000.000
5.4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	3.817.678	8.366.800
	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	26.790.000	20.000.000
	Pengembangan Industri kecil level Desa	0,00	0,00
	Pembentukan/Fasilitasi/Pel atihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	0,00	0,00
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00
5.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA	69.800.000	69.800.000
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000	5.000.000
	Keadaan Darurat	0,00	0,00
	Keadaan Mendesak	48.600.000	48.600.000
	JUMLAH BELANJA	1.863.956.141.44	1.998.180.450

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Gampang Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	38.730.509,57	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	38.730.509,57	0,00	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0,00	0,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan).

2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa

Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	984.268.200	828.113.088,32
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	36.690.792
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	318.893.494	248.973.264
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.065.514	30.316.296
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	45.222.800	79.514.019,48
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000	33.991.200
06	Penyediaan Operasional BPD	2.981.200	2.351.200
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.000.000	54.608.000
08	Penyediaan Operasional pemerintah dari Anggaran dana desa	37.700.000	32.500.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	108.000.000	108.000.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	57.036.700	0,00
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.800.000	76.929.845,27
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	116.841.000	6.200.000
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	3.227.000	0,00
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1.150.000	16.227.500
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.200.000	600.000
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.928.300	5.403.300
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	0,00	0,00
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.991.500	26.851.500
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	3.380.000	4.680.000
03	Penyusunan Dokumen	1.500.000	0,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.000.000	0,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000	1.475.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	2.000.000	0,00
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.000.000	0,00
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.154.900	12.434.671,57
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	0,00	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0,00	0,00
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	0,00	0,00
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	60.000.000	0,00
91	Forum Pembina Desa	5.980.000	7.900.000
1.5	Sub Bidang Pertanian		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	0,00
02	Administrasi Pertanian	5.000.000	0,00
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	0,00	0,00
04	Mediasi Konflik Pertanian	0,00	0,00
05	Penyuluhan Pertanian	0,00	0,00
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.000.000	41.616.500
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	0,00	0,00
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5.000.000	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 29 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 68,9%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	30.575.660	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.973.264	207.477.720	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.316.296	22.737.222	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	79.514.019,48	43.892.715,88	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	33.991.200	11.355.354	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	2.351.200	0,00	Tidak Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.608.000	40.248.000	Belum Tercapai
8.	Penyediaan Operasional pemerintah dari Anggaran dana desa	32.500.000	31.060.000	Belum Tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	108.000.000	102.000.000	Belum Tercapai
10.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	76.929.845,27	24.250.000	Belum Tercapai
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	6.200.000	0,00	Tidak Tercapai
12.	Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa	16.227.500	1.200.000	Belum Tercapai
13.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	600.000	0,00	Tidak Tercapai
14.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.403.300	0,00	Tidak Tercapai
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	26.851.500	14.754.000	Belum Tercapai
16.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.680.000	0,00	Tidak Tercapai
17.	Pengelolaan/Administrasi/In ventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.475.000	0,00	Tidak Tercapai
18.	Pengembangan Sistem	12.434.671,57	974.000	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
	Informasi Desa			Tercapai
19.	Forum pembina desa	7.900.000	2.450.000	Belum Tercapai
20.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.000.000	0,00	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 Kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 7 Kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 13 Kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

- 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	100.338.600	127.692.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	0,00	0,00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	0,00	0,00
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	0,00	0,00
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	0,00	0,00
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	140.000.000	0,00
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan	0,00	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	600.000	0,00
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0,00	0,00
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	1.000.000	0,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	0,00	0,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	157.840.100	173.317.500
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	0,00	0,00
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	42.930.900	51.099.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	0,00	0,00
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.500.000	3.830.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	0,00	0,00
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0,00	0,00
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.500.000	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	500.000	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	0,00
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0,00	0,00
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	0,00
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	0,00	0,00
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0,00	0,00
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	0,00
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	0,00	0,00
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0,00	0,00
09	Pemeliharaan	0,00	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan/ Pengerasan Jalan Desa	0,00	0,00
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	207.000.000	214.049.500
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	0,00	0,00
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	0,00	0,00
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Prasarana Jalan Desa	179.000.000	0,00
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	0,00
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	0,00	0,00
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	0,00	0,00
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0,00	0,00
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Embung Desa	0,00	0,00
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000	115.053.600
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	0,00	0,00
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	0,00	0,00
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	25.000.000	0,00
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0,00	0,00
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	0,00	0,00
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0,00	0,00
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	5.000.000	30.170.000
08	Pemeliharaan Sistem	0,00	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	0,00	0,00
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	0,00	0,00
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	0,00	0,00
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0,00	0,00
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	0,00	0,00
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0,00	0,00
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	5.000.000	0,00
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	0,00	0,00
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	0,00	0,00
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	0,00	0,00
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	0,00	0,00
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0,00	0,00
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	0,00	0,00
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyenyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		0,00
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0,00	0,00
02	Penyelenggaraan Informasi public Desa	2.000.000	0,00
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	0,00	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang Perhubungan,Komunikasi dan informatika	8.580.000	0,00
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0,00	0,00
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0,00	0,00
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0,00	0,00
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	6.550.000	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 16 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 43,75%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai Belum Tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	127.692.000	98.742.000	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Posyandu	173.317.500	127.952.500	Belum Tercapai
3.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.099.000	34.679.000	Belum Tercapai
4.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita(BKB)	3.830.000	0,00	Belum Tercapai
5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	214.049.500	214.049.500	Tercapai
6.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.053.600	71.804.000	Belum Tercapai
7.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	43.249.600	0,00	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	0,00
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	5.000.000	0,00
03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	0,00	0,00
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	0,00	0,00
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	0,00	0,00
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	3.000.000	18.422.059,12
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	24.262.900	16.929.559,12
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00	0,00
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0,00	0,00
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	12.000.000	0,00
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0,00	0,00
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	18.000.000	51.562.816
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0,00	0,00
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	0,00	0,00
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	0,00	0,00
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	9.549.000	0,00
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0,00	0,00
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	0,00	8.532.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	3.060.000	2.400.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.825.000	3.932.500
03	Pembinaan PKK	23.524.500	15.277.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.632.500	0,00
90	Pembinaan Karang Taruna	8.730.000	0,00
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.632.500	3.561.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 12 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 66,7%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	18.422.059,12	8.727.500	Belum Tercapai
2.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	16.929.559,12	8.727.500	Belum Tercapai
3.	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	8.532.000	984.500	Belum Tercapai
4.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	51.562.816	9.600.000	Belum Tercapai
5.	Pembinaan Lembaga Adat	2.400.000	1.400.000	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.932.500	6.25.000	Tercapai
7	Pembinaan PKK	32.840.500	15.277.000	Belum Tercapai
8	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.561.000	1.827.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 8 kegiatan

3.4 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0,00	0,00
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0,00	0,00
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0,00	0,00
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0,00	0,00
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0,00	0,00
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,00	0,00
02	Peningkatan Produksi Peternakan	0,00	0,00
03	Penguatan Ketahanan Pangan	10.000.000	48.406.500

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0,00	0,00
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	0,00	2.005.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	0,00	0,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0,00
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.500.000	0,00
03	Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000	0,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	0,00	0,00
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.000.000	0,00
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0,00	0,00
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	0,00	0,00
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	0,00	0,00
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1.800.000	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.000.000	50.566.400

Kod e	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	8.366.800	3.817.678
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	2.000.000	26.790.000
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	0,00	0,00
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 55,5 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	48.406.500	45.440.000	Belum Tercapai
2.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.005.000	0,00	Tidak Tercapai
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.566.400	50.424.800	Tercapai

No.	Jenis Kegiatan	Target	Berkas/Output	Penyampaian
4.	Pembelaksanaan Program Kerja Kesiswaan	1. 81.1.6.74	1. 81.1.6.74	Penyampaian
5.	Pembelaksanaan Program Kerja Kesiswaan	2. 81.1.6.74	2. 81.1.6.74	Penyampaian

Berkas/Output yang telah di kirim

1. Berkas/Output yang telah di kirim
2. Berkas/Output yang telah di kirim
3. Berkas/Output yang telah di kirim

4. Berkas/Output yang telah di kirim

5. Berkas/Output yang telah di kirim

No.	Jenis Kegiatan	Target	Berkas/Output	Penyampaian
1.	Pembelaksanaan Program Kerja Kesiswaan	1. 81.1.6.74	1. 81.1.6.74	Penyampaian
2.	Pembelaksanaan Program Kerja Kesiswaan	2. 81.1.6.74	2. 81.1.6.74	Penyampaian
3.	Pembelaksanaan Program Kerja Kesiswaan	3. 81.1.6.74	3. 81.1.6.74	Penyampaian

Berkas/Output yang telah di kirim

4. Berkas/Output yang telah di kirim

5. Berkas/Output yang telah di kirim

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	0,00	Tidak Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000	48.600.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Gampeng sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Terlambatnya Penyaluran dana Transfer Desa, Sehingga menyebabkan banyak kegiatan pemerintahan yang terlambat, seperti Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium BPD, BOP Pemdes, BOP BPD dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Lainnya.
- Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Ada yang Belum Tercapai Karena Kurangnya ADD.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Pada kegiatan bidang pembangunan yang berdasarkan RKP tidak bisa direalisasikan di Apbdes dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang lebih mendesak yang harus dianggarkan oleh Desa.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Pada kegiatan bidang pembinaan masyarakat yang berdasarkan RKP tidak bisa direalisasikan di Apbdes dikarenakan adanya kegiatan yang lebih mendesak untuk dilaksanakan.

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pada kegiatan bidang pembinaan masyarakat yang berdasarkan RKP tidak bisa direalisasikan di Apbdes dikarenakan adanya kegiatan yang lebih mendesak untuk dilaksanakan.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Kegiatan tanggap bencana adalah kegiatan yang tidak dapat diprediksi oleh pemerintah Desa, oleh karena itu perlu adanya dana cadangan tunai sewaktu-waktu bisa digunakan secara tepat.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Gampeng yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2026.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Menyusun rancangan peraturan desa tentang:

- 1) APB Desa Tahun Anggaran 2026
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2026
- 3) RKP Desa Tahun 2026
- 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026
- 5) Perkades BLT DD
- 6) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Musyawarah Desa

- 1) Musyawarah Desa penyusunan RKP
- 2) Musrenbangdes Penyusunan RKP
- 3) Musyawarah Khusus Penerima BLT DD
- 4) Musyawarah Analisis Kemiskinan
- 5) Musyawarah Raperdes RKP, APBDES
- 6) Musyawarah PHBN 2026

c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

- [illegible]

- h. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - i. Pembinaan Karang Taruna
 - j. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat.
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - d. Peningkatan Kapasitas BPD
 - e. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - f. Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang penanaman Modal
 - g. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - h. Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak.

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis, Srikandi).

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026 (Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026

DESA : GAMPENG
KECAMATAN : NGLUYU
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 Orang	1 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Pemdes	36.696.000	ADD	√	-	-
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	11 Orang	10 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Pemdes	248.973.264	ADD	√	-	-
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	12 Orang	12 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Pemdes	30.316.296	ADD	√	-	-
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	11 Orang	12 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	79.514.140	ADD,PBH,PAD	√	-	-
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	7 Orang	7 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	BPD	33.991.200	ADD	√	-	-
			6	Penyediaan Operasional BPD	18	7 Orang	7 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	BPD	3.351.200	ADD	√	-	-
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	18	40 Orang	40 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	RT/RW	55.800.000	ADD	√	-	-
			8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	15 Orang	15 Orang	2026	Masy Desa	12 Bulan	Masy Desa	32.500.000	DD	-	-	-
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	11 Orang	12 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	108.000.000	PAD	√	-	-
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	18	11 Orang	11 Orang	2026	Desa Gampeng	1 Paket	Masy Desa	15.000.000	ADD,PBH	√	-	-	
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	60.000.000	DD,PBH	√	-	-	

		3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	1 Paket	1 Paket	2026	Desa Gampeng	1 Paket	Masy Desa	6.200.000	ADD	√	-	-
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	18	11 Orang	11 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	3.227.000	ADD	√	-	-
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	18	11 Orang	11 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	16.227.500	DD	√	-	-
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	11 Orang	11 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	600.000	DD	√	-	-
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	11 Orang	11 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	5.403.300	DD	√	-	-
		90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,17	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	6 Kegiatan	Masy Desa	26.851.500	DD	√	-	-
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,17	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	2 Kegiatan	Masy Desa	4.680.000	DD	√	-	-
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,17	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	2 Kegiatan	Masy Desa	1.500.000	DD	√	-	-
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,17	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	3 Kegiatan	Masy Desa	1.000.000	DD	√	-	-
		5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	17	12 Bulan	12 Bulan	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	1.425.000	DD	√	-	-
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	17	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	3 Kegiatan	Masy Desa	2.000.000	DD	√	-	-
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	1 Kegiatan	Masy Desa	1.000.000	DD	√	-	-
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	3 Kegiatan	Masy Desa	12.434.600	DD	√	-	-

			9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	18	3 Orang	3 Orang	2026	Desa Gampeng	1 Kegiatan	Masy Desa	10.000.000	ADD	√	-	-
			11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	18	3 Orang	3 Orang	2026	Desa Gampeng	1 Kegiatan	Masy Desa	20.000.000	ADD	√	-	-
			91	Forum Pembina Desa	18	7 Orang	7 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	7.900.000	ADD	√	-	-
5	Pertanahan	1		Sertifikasi Tanah Kas Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Administrasi Pertanahan	17	12 orang	10 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	5.000.000	DD	√	-	-
		3		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4		Mediasi Konflik Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5		Penyuluhan Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	12 orang	10 Orang	2026	Desa Gampeng	10 Orang	Pemdes	41.616.500	BHPRD	√	-	-
		7		Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Bidang 1												871.207.500				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa															
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	5	34 Orang	34 Orang	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Pemdes	127.692.000	DD	√	-	-
			2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	5	4 TK	4 TK	2026	Desa Gampeng	4 TK	Masy Desa	89.562.400	DD	√	-	-
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk atan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	5	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	1.200.000	DD	√	-	-
		9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	5	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	1.000.000	DD	√	-	-
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Penyelenggaraan Posyandu	3	9 Posyandu	9 Posyandu	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	173.317.500	DD	√	-	-
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Paket	1 Paket	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	51.099.000	DD	√	-	-
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	9 Posyandu	9 Posyandu	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	3.830.000	DD	√	-	-
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	3	9 Posyandu	9 Posyandu	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	4.500.000	DD	√	-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3	9 Posyandu	9 Posyandu	2026	Desa Gampeng	12 Bulan	Masy Desa	5.000.000	DD	√	-	-
		3	Pekerjaan Umum dan	1	Pemeliharaan Jalan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penataan Ruang

2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	9	2 kegiatan	2 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	2 Kegiatan	Masy Desa	184.150.150	DD	√	-	-
13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	9	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2026	Dusun Puncu dan dusun	2 Kegiatan	Masy Desa	78.050.000	DD	√	-	-
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	2 Paket	2 Paket	2026	Desa Gampeng	2 Kegiatan	Masy Desa	20.000.000	DD	✓	-	-
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	9	2 Unit	2 Unit	2026	Desa Gampeng	2 Unit	Masy Desa	50.000.000	DD	✓	-	-	-
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	9	1 kegiatan	1 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	1 Kegiatan	Masy Desa	5.000.000	DD	✓	-	-	-
		16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

5	1	Penganggaran	00	Penganggaran Bencana	3	1 Paket	1 Paket	2026	Desa Gampeng	1 Paket	Masy Desa	3.000.000	DD	-	-	-
	2	Keadan Darurat	00	Keadan Darurat	3	1 Paket	1 Paket	2026	Desa Gampeng	1 Paket	Masy Desa	2.000.000	-	-	-	-
Jumlah Bidang 4																
												117.666.800				
6	Koperasi, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan dan Penguatan Masyarakat	3	Pelatihan dan Penguatan Masyarakat (penyandang disabilitas)	-	20 Orang	20 Orang	2026	Desa Gampeng	1 Kegiatan	Masy Desa	1.000.000	DD	-	-	-
			1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1	Pembentukan BUM Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2026	Desa Gampeng	1 Kegiatan	Masy Desa	1.800.000	DD	-	-	-
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	2	1 Paket	1 Paket	2026	Desa Gampeng	1 Paket	Masy Desa	50.000.000	DD, DLL	-	-	-
			1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	2	1 Paket	1 Paket	2026	Desa Gampeng	1 Paket	Masy Desa	8.366.800	DD	-	-	-
			2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	2	1 Unit	1 Unit	2026	Desa Gampeng	1 Unit	Masy Desa	20.000.000	DD	-	-	-
Perdagangan dan Industri	Pelatihan dan Penguatan Industri	3	Pengembangan Industri kecil level Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														117.666.800		

MENGETAHUI
KEPALA DESA GAMPENG
TELIANA SING FAEDAHTI, S. Keb. Bd

KETUA TIM PENYUSUN
SUTOYO

Gampeng, 24 September 2025

3	Kadaan	Mendesak	00	Kadaan Mendesak	1	18 KK	18 KK	2026	Desa Gampeng	18 KK	Masy Desa	64.800.000	DD	-	-
Jumlah Bidang 5															
													69.800.000		
JUMLAH TOTAL															
													1.998.180.450		

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercipta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA GAMPENG,



TELIANA SING FAEDAHTI